

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Setiap proses pembangunan yang di laksanakan oleh suatu Negara memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, begitu pula halnya dengan Negara Indonesia saat ini, yaitu melaksanakan program pembangunan nasional dengan tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual, baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan.

Di dalam melaksanakan pembangunan dan perbaikan ekonomi tersebut, salah satu masalah pokok yang sering dihadapi adalah keterbatasan modal yang menyangkut masalah pembentukan dan penyaluran dana. Untuk itu pemerintah mengambil langkah dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dalam bentuk jasa bank. Dalam hal ini pihak yang berfungsi sebagai pemberi kredit yaitu perbankan dan ada pihak yang berfungsi sebagai penerima kredit .

Industri Perbankan telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi industri informasi yang intensif dan ekstensif telah mempengaruhi kebijakan dan strategi dunia usaha perbankan yang selanjutnya lebih mendorong inovasi dan persaingan dibidang produk dan layanan dengan karakteristik yang modern dengan sistem dan teknologi yang dikembangkan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan resiko yang ditimbulkan.

Perbankan merupakan lembaga ekonomi yang berperan penting dalam kehidupan suatu negara, kegiatan dunia usaha baik di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan secara umum tidak bisa dilepaskan dari peranan jasa bank atau dunia perbankan. Berdasarkan undang – undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan

penyalur dana pada masyarakat dalam kredit. Di samping itu bank juga berfungsi sebagai penyalur dana guna pembiayaan pembangunan.

Pada tanggal 5 November Bapak Presiden Republik Indonesia meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui Perusahaan Penjamin. Dalam penyaluran KUR ini, Bank akan memberikan perhatian yang lebih kepada jumlah usaha mikro yang dapat diakses atau dilayani.

Sumatera Barat merupakan daerah yang potensial untuk penyaluran KUR karena sebagian besar usaha produktif di Sumatera Barat terdiri dari UMKMK. Dengan keikutsertaan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai Bank pelaksana program-program pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran dan Perluasan lapangan pekerjaan serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pada pelaksanaan KUR ini bank akan dihadapkan pada beberapa masalah dalam pemberian kredit yang disetujui terhadap kemacetan-kemacetan dalam pembayaran angsuran yang menimbulkan kerugian pihak bank. Supaya kredit yang diberikan tersebut lancar maka pihak bank harus selektif dalam memberikan kredit pada debitur, dimana sebelum kredit di berikan maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman. Oleh sebab itu bank harus bisa menetapkan prosedur pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah-masalah yang timbul, karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan KUR berikut dengan beberapa kebijakan pendukungnya, maka diharapkan penyaluran KUR oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan didukung serta dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap pelakasana/pejabat perkreditan sehingga rencana penyaluran KUR tersebut dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan. Bertitik tolak dari uraian di atas penulis tertarik untuk membahas

lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam pemberian kreditnya permasalahan ini penulis susun dalam bentuk laporan kerja praktek dengan judul Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Nagari Cabang Solok.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Solok dan hal-hal apa saja yang diperlukan dalam prosedur pelaksanaan kreditnya pada debitur.
2. Bagaimana proses analisa dan seleksi masyarakat yang akan diberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Nagari Cabang Solok.
3. Formulir dan dokumen apa saja yang digunakan dalam prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Nagari Cabang Solok.
4. Bagaimana bentuk pengendalian kredit pada Bank Nagari Cabang Solok

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan dari kegiatan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) yang ditetapkan oleh Bank Nagari Cabang Solok dalam pemberian kreditnya pada nasabah serta bagaimana penerapannya dalam metoda sistim informasi akuntansi dalam struktur internal perusahaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk analisa dalam hal persyaratan calon debitur yang layak mendapatkan kucuran dana kredit yang diterapkan Bank Nagari Cabang Solok.
3. Mengetahui bagaimana bentuk pengendalian kredit pada Bank Nagari Cabang Solok.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Menambah Informasi dalam bidang perkreditan dan mengetahui kebijaksanaan dari Bank Nagari Cabang Solok.
2. Mengetahui bagaimana Bank Nagari Cabang Solok menyalurkan kredit yang akan diberikan pada nasabah.
3. Mengetahui tingkat kesesuaian antara implementasi prosedur pelaksanaan kredit usaha rakyat pada Bank Nagari Cabang Solok dengan Teori yang akan di bahas.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penyaluran kredit berjalan dengan lancar maka pihak bank harus selektif memilih debitur yang layak diberikan kredit. Banyak permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran yang berasal dari pihak bank atau dari pihak itu sendiri. Untuk itu pihak bank mengharuskan debiturnya melaksanakan prosedur pelaksanaan kredit diantaranya pemberian kredit yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada pada bank yang bersangkutan serta melaksanakannya dengan konsekuen.

Disamping itu pihak bank harus dapat mengadakan suatu sistim kerja yang professional terhadap kredit yang disalurkan terdiri dari analisa yang tepat dalam hal seleksi calon debitur dan pengawasan kerja bagian-bagian dalam struktur organisasi perusahaan, oleh sebab itu masalah yang dihadapi dalam pemberian kredit dapat diatasi. Jadi pelaksanaan kredit ini lebih ditekankan pada pelayanan bank yang berhubungan langsung dengan debitur yaitu prosedur pelaksanaan kredit, sistim kerja dari pihak penjamin yang efektif dalam pemberian kredit pada debitur.

### **1.6 Metode Penelitian**

1. Data dan sumber data

Data mengenai sumber dana, syarat-syarat calon debitur, prosedur pemberian kredit, dokumen-dokumen yang di perlukan dalam hal pencatatan dana kredit yang

telah di salurkan syarat-syarat jaminan kredit berdasarkan kebijaksanaan kredit yang telah ditetapkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

## 2. Metoda Pengumpulan Data

Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagian administrasi kredit untuk membahas mengenai hal-hal yang dianggap penting untuk penulisan laporan kerja praktek.

### 1.7 Sistematika Penulisan

#### BAB I

Merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Ruang lingkup penelitian.

#### BAB II

Merupakan landasan teori yang menguraikan tentang pengertian kredit, pengertian KUR, pengertian bank, sasaran tujuan terhadap KUR, pola pemberian KUR, collectibility kredit, sistim pengendalian kredit.